



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : BUMN/BUMD  
**LEMBAGA** : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)  
**UNIT KERJA** : UIP SUMATERA BAGIAN SELATAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **MUHAMMAD DAHLAN DJAMALUDDIN**
2. Jabatan : **GENERAL MANAGER**
3. NHK : **192048**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

**Rp. 2.738.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 175 m2/54 m2 di KAB / KOTA BANJAR, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 136 m2/86 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.050.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/78 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000
4. Tanah Seluas 293 m2 di KAB / KOTA POLEWALI MANDAR , HASIL SENDIRI Rp. 113.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

**Rp. 841.000.000**

1. MOTOR, HONDA D1B02N12L2 A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOBIL, HONDA BRIO RS 1,2CVT CKD/MB PENUMPANG Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
3. MOBIL, MITSUBISHI MB PENUMPANG/JEEP Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
4. MOTOR, YAMAHA RODA DUA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

**Rp. 54.706.000**

**D. SURAT BERTHARGA**

**Rp. ----**

**E. KAS DAN SETARA KAS**

**Rp. 1.922.837.683**

**F. HARTA LAINNYA**

**Rp. 18.450.000**

**Sub Total**

**Rp. 5.574.993.683**



III. HUTANG

Rp. 228.288.790

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 5.346.704.893

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.